

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan yang telah penulis uraikan pada Bab III yaitu data yang diperoleh penulis dari pokok bahasan dan landasan teori pada Bab II, penulis dapat menyimpulkan bahwa siklus pengeluaran di SD Negeri Panunggangan 2 berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori yang dipelajari oleh penulis. Ada perbedaan antara teori yang diterapkan dan yang dipelajari. Menurut penulis, perbedaannya tidak signifikan. Perbedaan tersebut muncul karena SD Negeri Panunggangan 2 merupakan organisasi non profit yang fokus melayani masyarakat dalam bidang pendidikan, sedangkan landasan teori menjelaskan penerapan siklus pengeluaran pada perusahaan komersial yang merupakan organisasi profit.

Alur proses siklus pengeluaran yang diterapkan di SD Negeri Panunggangan 2 mulai dari pengajuan pembelian sampai dengan pembayaran dan pencatatan, pemenuhan dokumen, serta ketentuan sesuai aturan yang berlaku secara umum telah sesuai dengan teori. Perbedaannya terletak pada penamaan dokumen dan adanya beberapa fungsi seperti kasir dan bagian penerimaan. Hal tersebut wajar melihat bahwa sekolah bukanlah organisasi nirlaba yang beroperasi di bawah

undang-undang dan peraturan, dan teori menjelaskan penerapannya di perusahaan komersial.

Penulis menilai kendala terkait pelaksanaan kegiatan siklus pengeluaran di SD Negeri Panunggan 2 tidak mengawatirkan. Sebagian besar terjadi akibat kesalahan pegawai yang tidak dapat dihindari. SD Negeri Panunggan 2 juga dapat menyelesaikan hal tersebut dengan pengendalian internal yang cukup memadai. SD Negeri Panunggan 2 telah menerapkan beberapa pengendalian internal dan secara keseluruhan sudah cukup baik serta sudah sesuai dengan komponen-komponen pada COSO *framework*.

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah penulis susun terhadap siklus pengeluaran SD Negeri Panunggan 2, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. SD Negeri Panunggan 2 dapat menetapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) dengan SK Kepala Sekolah atau peraturan lainnya untuk pelaksanaan siklus pengeluaran di SD Negeri Panunggan 2. Prosedur tertulis yang spesifik ada untuk memfasilitasi pelaksanaan kontrol. Selain itu jika ada perubahan posisi pemegang jabatan di masa depan, prosedur yang jelas akan memudahkan pemegang posisi baru untuk menjalankan tanggung jawabnya.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan pembaruan aplikasi Sistem Informasi BOS Salur dengan lebih terjadwal sehingga tidak menyulitkan operator di sekolah dalam melakukan *input* data transaksi.
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Dalam Negeri dapat bekerja sama dalam pembuatan satu format pencatatan pada Microsoft

Excel agar pencatatan terkait siklus pengeluaran dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.